

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi

Rencana pembangunan jangka panjang Indonesia tentunya mengadopsi visi ini, terutama dengan menghubungkan inisiatif TIK dengan inisiatif pengembangan sumber daya manusia, yang juga berisikan penciptaan masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan-layanan pemerintah kepada publik.

Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Kota Bima juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik inisiatif-inisiatif TIK Kota juga dilakukan dalam rangka mewujudkan misi Kota Bima yang ke 2 "Mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual". Didalam organisasi pemanfaatan TIK merupakan satu lapisan pengelolaan khusus yang juga memerlukan perhatian tersendiri. Oleh karena itu, dalam pengembangannya, penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini haruslah dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan elemen-elemen masyarakat. Hal inilah yang menjadi peran inti dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kota Bima.

Berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, sampai ke Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah tergambar tentang keseriusan upaya pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan, atau yang secara populer disebut sebagai *e-Government*

Dengan disusunnya Renstra Dinas Kominfo ini, maka Dinas Kominfo mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan TIK. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2013-2018 serta memperhatikan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Propinsi sehingga mensinergikan pembangunan TIK di Kota Bima dengan pembangunan TIK nasional dan Propinsi. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus bahan kebijakan teknis Dinas dengan tetap memiliki korelasi dengan visi dan misi pemerintah Kota Bima, agenda serta visi dan misi Kota Bima sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Selain itu, Renstra ini masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan (Renja), agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih konkrit.

Penerapan Teknologi Informasi yang baik pada gilirannya akan mendukung proses penentuan arah dan kebijakan organisasi. Dukungan teknologi informasi bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi, dalam menjalankan berbagai fungsinya. Dinas Kominfo sebagai salah satu unsur dinas berupaya untuk memfungsikan dirinya sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari fungsi-fungsi komunikasi dan informatika tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bima didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Nomor 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima pada Tahun 2013-2018.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2013-2018 ini adalah :

1. Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;
2. Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Kominfo Kota Bima dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan tahun 2013-2018.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Kominfo, fungsi Renstra Dinas Kominfo dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah, proses penulisan Renstra OPD, keterkaitan Renstra Propinsi serta Renja OPD

1.2. Landasan Hukum

Memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kominfo serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kominfo.

1.3. Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penulisan Renstra Dinas Kominfo.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Kominfo serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO

Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan Dinas Kominfo.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Kota/kab; penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisi mengenai Visi dan Misi; tujuan dan sasaran jangka menengah; serta strategi dan kebijakan Dinas Kominfo Kota Bima.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Berisi mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berisi indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kominfo Kota Bima dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Berisi penjelasan kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen Dinas Kominfo Kota Bima terhadap pelaksanaan Renstra maupun RPJMD

BAB II

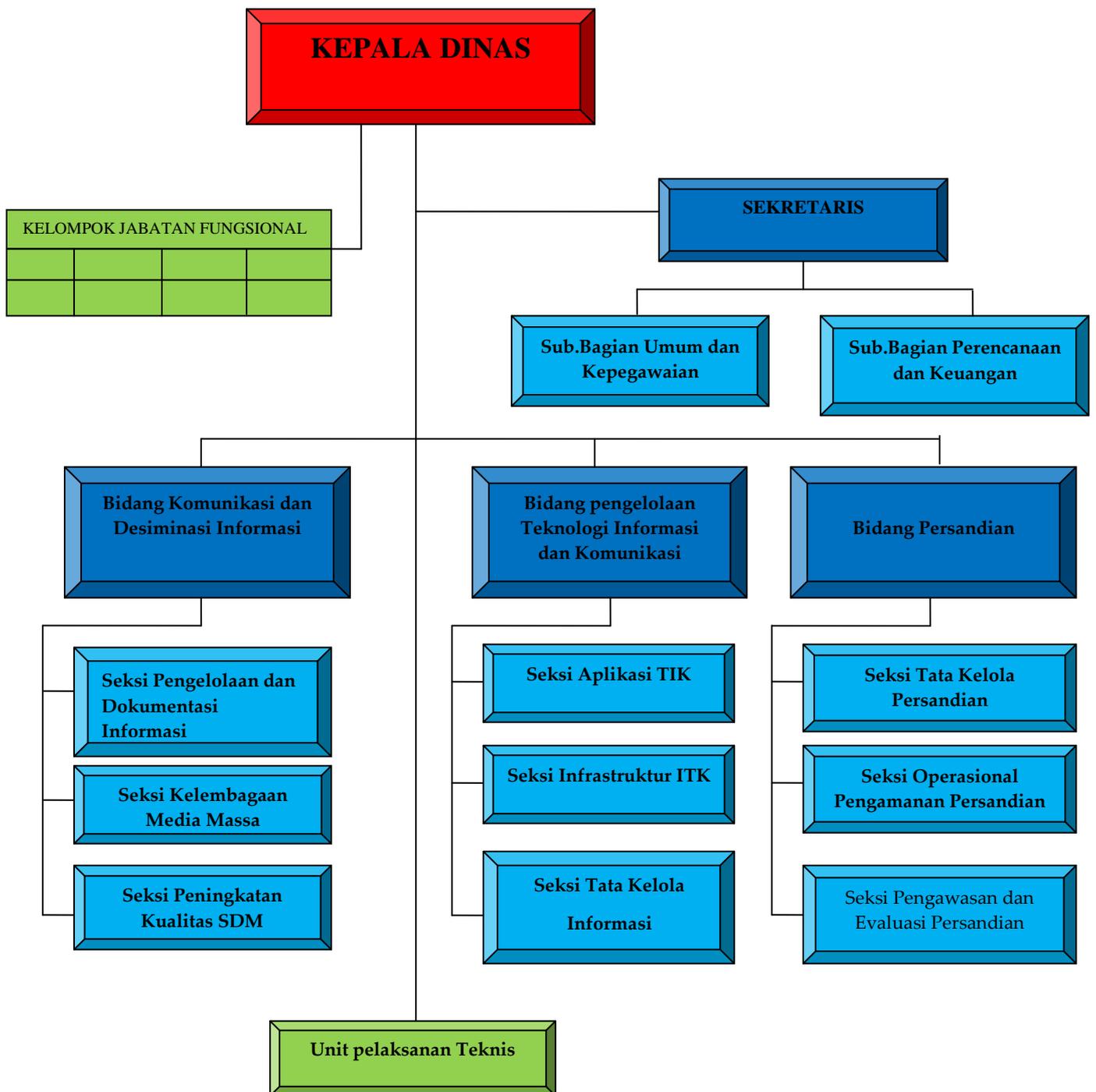
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BIMA

2.1. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BIMA

2.1.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima serta Peraturan Walikota Bima Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Kominfo terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), tiga orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 11 orang Kepala Subbagian/Seksi (Eselon IV). Untuk Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing pejabat struktural dapat dilihat pada lampiran 1.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BIMA**



2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima. Adapun tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima adalah membantu Kepala Daerah dalam hal perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan desiminasi informatika serta tugas pembantuan.

b. Fungsi

Sedangkan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika
4. Pengelolaan ketatausahaan Dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2. Sumber Daya SKPD

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima didukung dengan keberadaan SDM dan Sarana dan Prasarana..

2.2.1. Sumber Daya Manuasia

Upaya keberhasilan dalam meningkatkan kinerja dinas memunculkan konsekuensi diperlukannya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memiliki

kompetensi khususnya di bidang teknologi informasi, baik di tingkat pengguna, pengelola maupun pimpinan. Keterbatasan SDM merupakan salah satu penyebab berbagai inisiatif pengembangan *e-government* menjadi kurang terarah dengan baik. Sementara itu untuk menjamin keberlangsungan sinergitas implementasi sistem informasi dan telematika, diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana sistem bidang teknologi informasi. Berdasarkan data dokumentasi Dinas Kominfo pada tahun awal tahun 2017 memiliki SDM pengelola *e-government* seperti ditunjukkan di bawah ini.

a. REKAPITULASI PEGAWAI PER GOLONGAN (Data Awal Tahun 2017)

No	Golongan Ruang	Jumlah	Persen (%)
1.	IV.c	1	3,70
2.	IV.b	1	3,70
3.	IV.a	2	7,41
4.	III.d	3	11,11
5.	III.c	8	29,63
6.	III.b	4	14,81
7.	III.a	6	22,22
8.	II.d	1	3,70
9.	II.c	-	-
10.	II.b	1	3,70
11.	II.a	-	-
	Jumlah	27	100

b. REKAPITULASI PEGAWAI PNS DAN CPNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL (Data Awal Tahun 2017)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen (%)
1.	SD	-	-
2.	SMP	-	-
3.	SMU	8	29,63
4.	D.4	-	-
5.	D.3	-	-
6.	S.1	15	55,56
7.	S.2	4	14,81
8.	S.3	-	-
	Jumlah	27	100

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima ditunjang dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai disebabkan karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima merupakan dinas baru dan untuk sementara sarana dan prasarana masih pinjam dari exs Badan Lingkungan Hidup Kota Bima . sehingga pada awal tahun 2017 Dinas kominfo Kota Bima belum memiliki asset tetap

Dengan kurang memadainya sarana prasarana tersebut, sejauh ini kegiatan pelayanan dalam bidang Komunikasi dan Informatika masih kurang maksimal.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dapat dilihat dalam Tabel 2.1 (lampiran) serta Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dapat dilihat dalam table 2.2 (lampiran)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1. Tantangan

1. Keterbatasan kewenangan Kab/Kota;
2. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif;
3. Kurangnya koordinasi dalam penyusunan program;
4. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika;
5. Regulasi kewenangan belum terimplementasikan;
6. Keterbatasan kapasitas sumber daya;
7. Belum bakunya pola arus data informasi antar instansi;
8. Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi;
9. Keterbatasan anggaran;
10. Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki.

2.4.2. Peluang

1. Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan komunikasi dan Informatika;
2. Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan komunikasi dan informatika;
3. Tersedianya sarana prasarana pengembangan dan pengelolaan sumber daya IT;
4. Ketersedianya kelompok informasi masyarakat (KIM) selaku ujung tombak penyebaran informasi;
5. Kebutuhan organisasi yang semakin meningkat;
6. Komitmen semua unsur Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas

Tabel 2.3.
Komparasi Capaian Sasaran Dinas Kominfo Kota Bima terhadap Sasaran Renstra OPD Propinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPB Kota Bima	Sasaran Pada Renstra OPB Propinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1.	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government		
2.	Prosentase Pengelolaan Website di Pemerintahan Kota Bima yang aktif dan memberikan informasi yang Up to Date	Tersusunya program pemasangan Wifi di tempat umum dan sarana pendidikan, kantor, puskesmas dan sebagainya		
3.	Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan		
4.	Responsifitas pengaduan yang diteruskan kepada SKPD Terkaid	Penguatan sumber daya manusia untuk merespon pengaduan informasi		
5.	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		

Tabel 2.4.
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Bima

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Kominfo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-

Tabel 2.5.
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Bima

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Dinas Kominfo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-

Tabel 2.6
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Kota Bima Dinas Kominfo

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi perumusan Program dan kegiatan OPD
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan			
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup			
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem			
4	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim			
5	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati			

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standart yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Pelayanan Permasalahan
			Internal	Eksternal	
infrastruktur <i>e-government</i>	SKPD yang sudah menerapkan <i>e-government</i> /aplikasi pemerintahan yang terintegrasi (20%)	1. UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	Status keberadaan jaringan belum menggunakan mekanisme penganggaran secara <i>fixed cost</i>	Besaran alokasi anggaran tidak pasti setiap tahunnya	Keterbatasan tenaga teknis dari sisi jumlah dan kualifikasi
		2. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;			
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Belum ada terbentuknya KIM	Permodelan KIM Tahun 2008	Pembinaan KIM merupakan kewenangan dari kabupaten/kota	Belum berperan aktifnya masyarakat terhadap IT	Belum termanfaatkannya KIM sebagai media penyampaian informasi

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Perdagangan Barang dan Jasa yang Beriman, Maju, Adil dan Sejahtera				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 2: Mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual". Misi 3: "Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima".			
1.	Program Pendidikan Kedinasan	Terbatasnya kemampuan teknis aparatur	Terbatasnya anggaran	Komitmen Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas
2.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		Terbatasnya anggaran	Komitmen Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas
3.	Program kerjasama informasi dengan mas media		Terbatasnya anggaran	Komitmen Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas
4.	Program Pengadaan Perangkat Aplikasi dan Telematika		Terbatasnya anggaran	Komitmen Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas
5.	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah		Terbatasnya anggaran	Komitmen Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas
6.	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Terbatasnya kemampuan teknis aparatur	Terbatasnya anggaran	Komitmen Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas

7.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Sumberdaya Postel	Terbatasnya kemampuan teknis aparatur	Terbatasnya anggaran	Komitmen Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas
8.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingginya tuntutan pelaksanaan tugas aparatur	Terbatasnya anggaran	Komitmen Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas
9.	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingginya tuntutan pelaksanaan tugas aparatur	Terbatasnya anggaran	Komitmen Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas
10.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terbatasnya kemampuan teknis aparatur	Terbatasnya anggaran	Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
11.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingginya tuntutan pelaksanaan tugas aparatur	Terbatasnya anggaran	Komitmen Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas

Tabel 3.3.
Telaah Renstra Kementerian Kominfo

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia	Masih terbatasnya sarana dan prasarana di Kota Bima	Keterbatasan kewenangan Kab/Kota	Kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana terus mengalami peningkatan
2	Tersedia dan tersebar informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI	Masih rendahnya sinkronisasi pelaksanaan program	Kurangnya koordinasi dalam penyusunan program	Adanya kesamaan fungsi dan wewenang
3	Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal	1. Masih terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi data; 2. Masih rendahnya kemampuan komunikasi dan informatika aparatur, dunia usaha dan masyarakat	1. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika 2. Keterbatasan Anggaran	Adanya kesamaan fungsi dan peran
4.	Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif mencerahkan dan memberdayakan masyarakat	1. Keterbatasan ketersediaan data 2. Keterbatasan Anggaran	1. Belum bakunya pola arus data informasi antar instansi 2. Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi	1. Kebutuhan masyarakat dan pemerintah atas informasi yang cepat, murah dan akurat 2. Keberadaan

				undang-undang keterbukaan informasi publik
5.	Tercapainya peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan penyebaran dan kemanfaatan informasi edukatif mencerahkan dan memberdayakan masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan peran mitra kerja (KIM, Metra, Lembaga Penyiaran, dan Media Cetak)	1. Keterbatasan Anggaran 2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika	Adanya kesamaan fungsi dan peran
6.	Mendorong penciptaan SDM unggul di bidang komunikasi dan informatika	Adanya kesenjangan yang besar antara kebutuhan dan ketersediaan SDM unggul	1. Keterbatasan Anggaran 2. Inkonsistensi penempatan sdm dengan kompetensi yang dimiliki	Tersedianya fasilitas peningkatan kapasitas SDM unggul
7.	Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan	Belum dijadikan prioritas	Belum terciptanya instrumen yang dapat menumbuhkembangkan industri komunikasi dan informatika	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika
8.	Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi berdasarkan	Belum dijadikan prioritas	Belum terciptanya instrumen yang dapat menumbuhkembangkan industri komunikasi dan informatika	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika
9.	Membangun pencitraan positif Negara Indonesia di mata internasional	Belum dilakukan secara optimal pemanfaatan potensi bidang komunikasi dan informatika	Keterbatasan kapasitas sumber daya	Tersedianya media elektronik maupun non elektronik

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi NTB
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kominfo Propinsi NTB	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur jaringan	1. Keterbatasan Anggaran 2. Koordinasi yang belum optimal	Sinkronisasi program belum terwujud	Telah adanya dukungan regulasi pendukung

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS Terkait Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

3.4. Penentuan Isi-Isu Strategis

Berdasarkan RPJMD 2013-2018, terdapat analisis isu dan strategis bidang kominfo dengan penjelasan sbb:

1. Permasalahan utama bidang kominfo:
 - a. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal;
 - b. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.
2. Isu Strategis bidang kominfo:
 - a. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan;
 - b. Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi

- c. Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Simplikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Mewujudkan Kota Bima Smart City.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima

Visi Dinas Kominfo Kota Bima pada dasarnya tidak terlepas dari visi Pemerintah Kota Bima yaitu **“TERWUJUDNYA KOTA BIMA SEBAGAI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERIMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”**.

Penetapan visi Dinas Kominfo Kota Bima disamping harus berlandaskan pada tugas pokok Dinas yaitu “ melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan urusan bidang komunikasi dan informatika”. Dalam kurun waktu 2013-2018 Dinas Kominfo Provinsi Kota Bima hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Dinas Kominfo Kota Bima telah mengantisipasinya dengan menetapkan visi yaitu **“Terwujudnya Efektifitas, Efisiensi, Komunikasi Informatika dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mendukung Kota Bima sebagai Kota Berteman”**. Untuk mencapai Visi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Memiliki Misi:

Meningkatkan Kinerja dan mengembangkan layanan publik serta pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Bima berbasis teknologi informasi (IT)

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima disajikan pada table 4.1 s/d 4.3 (Terlampir)

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima disajikan pada table 4.2 (Terlampir)

BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disusun sebagaimana tabel 5.1. terlampir

BAB VI

**INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Menjelaskan indikator kinerja Dinas Kominfo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel tabel 6.1. terlampir

BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Kominfo Kota Bima periode 2013-2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo untuk 5 (lima) tahun, dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kota Bima, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kota Bima.

Dalam Perjalanannya, Renstra Dinas Kominfo Kota Bima ini baru pertama kali disusun sesuai amanat RPJMD tahun 2013-2018 sebagai bentuk upaya pemerintah Kota Bima untuk lebih meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Perubahan atau revisi Renstra ini diharapkan juga dapat memberikan makna terhadap skala prioritas pembangunan di bidang TIK melalui penetapan kembali program unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan Renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Kominfo. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Kominfo harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

KEPALA DINAS KOMINFO
KOTA BIMA,

Ir. SUPAWARMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630506 199203 1 012